

**IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI E  
DPRD SUMUT TERHADAP PEMBANGUNAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**APRILIA HERLIN**  
**NPM : 1403090013**

**Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **APRILIA HERLIN**  
N P M : 1403090013  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI E DPRD SUMUT TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI SUMATERA UTARA**

Medan, 19 Maret 2018

PEMBIMBING I

  
**Dr. MOHD. YUSRI, M.Si**

DISETUJUI OLEH:  
KETUA JURUSAN,

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

DEKAN,

  
**Dr. RUDIANTO, M.Si**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **APRILIA HERLIN**  
N P M : 1403090013  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Pada hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018  
Waktu : 08.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP** (.....)  
PENGUJI II : **Dr. H. AZAMRIS CHANDRA, M.AP** (.....)  
PENGUJI III : **Dr. MOHD. YUSRI, M.Si** (.....)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. RUDIANTO, M.Si**

**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Aprilia Herlin**, NPM : **1403090013**. Menyatakan dengan bersungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima skripsi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medana,       Maret 2018

Yang menyatakan,

APRILIA HERLIN

## **ABSTRAK**

# **“IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI E DPRD SUMUT TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI SUMATERA UTARA”**

**APRILIA HERLIN**  
**NPM: 1403090013**

Sebagai seorang mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD Sumatera Utara Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara. Dimana penelitian melihat bahwa permasalahan di Komisi E DPRD SUMUT kurang efektif karena dalam melaksanakan program-program yang dijalankan tidak dapat mendorong pelayanan publik yang baik sehingga tidak optimal dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD Sumatera Utara Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD Sumatera Utara terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Dan kegiatan ini wawancara dilakukan dengan lima narasumber. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat menginginkan dan mengharapkan bahwa Anggota DPRD Komisi E lebih memperhatikan dalam masalah-masalah yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara.

**Kata Kunci: DPRD, Pembangunan, Kesejahteraan sosial**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha Suci Allah SWT yang menganugrahkan setiap orang yang menjalani hidup didunia ini yang berbeda-beda. Maha Indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD SUMUT Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar gembira dan keselamatan bagi seluruh umat manusia serta membawa pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini nantinya.

Sebuah karya kecil dari perjalanan panjangku, kupersembahkan juga kepada Abangnda Rheza Hermawan, Abangnda Arie Ferdiawan, Adinda Ivo Yuni Kartika dan Kembaran Saya Aprilia Herlin yang selalu member berupa do'aa, semangat dan motivasi kepada saya demi keberhasilan di saat hidupku dalam menyelesaikan pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini. Hamba memohon kepada-Mu Ya Allah semoga mereka selalu dalam perlindunganmu.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada kedua orangtuaku ayahanda Herman dan Ibunda Marlina yang telah membuat saya semangat dalam menjalankan perkuliahan ini sampai selesai pada saat yang diharapkan.
3. Bapak Drs. Tasrif Syam. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar., S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mohd. Yusri, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing.
6. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Dosen yang telah membantu membimbing dan memberikan arahan serta waktunya.
7. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi.
9. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si dan Bapak Ir.Zahir, MAP, kemudian Anggota Partai Golkar Bapak Eka Nisa Hendrawan, serta masyarakat yang telah membantu memenuhi skripsi.
10. Semua rekan satu angkatan Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya kepada seluruh teman-teman kelasku yang telah senantiasa memberi sumbangsih saran dan masukan.
11. Kepada Sahabat dan Teman-teman dekat terkhususnya kepada Dara Ayu Wulandari, Bonica Meiswandi, Yosi Jumaita, yang tak bosan-bosannya selalu memberikan semangat dan motivasi.

12. Kepada seseorang yang membuat saya terus bersemangat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memberikan motivasi yang tiada henti-hentinya yaitu Edva Nico, S.STP

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk diperkuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi ini dan semoga kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik kedepannya. Amin.

Medan, 2018

Penulis

Aprilia Herlin

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Implementasi.....	12
B. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	13
C. Efektifitas.....	13
D. Pembangunan.....	14
E. Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial.....	16
F. Kesejahteraan Sosial.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Kerangka Konsep.....	20
C. Definisi Konsep.....	21
D. Kategorisasi.....	24
E. Informan atau Narasumber.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	27

H. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
-------------------------------------	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA**

A. Hasil Penelitian.....	29
--------------------------	----

B. Pembahasan .....	37
---------------------	----

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	55
---------------------	----

B. Saran.....	56
---------------	----

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1.	Bidang-bidang di Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	2
1.2.	Beberapa indikator dalam melihat Indeks Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara.....	6

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
3.1.	Kerangka Konsep.....	21
4.1	Bagian Struktur Organisasi Sekretariat Dprd Sumatera Utara.....	30
4.2	Bagian Depan DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	31
4.3	Struktur Organisasi Komisi E.....	33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan. fungsi legislasi, merancang kebijakan-kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik dan standar. Fungsi budgeting, memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat sasaran, efisien jumlah maupun waktunya. fungsi pengawasan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi juga semestinya setara dalam hal tanggungjawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik.

Memahami peranan DPRD yang sangat strategis, menimbulkan harapan yang besar dari masyarakat agar para wakil rakyat yang terpilih untuk periode saat ini (2019–2024) dapat menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat, melaksanakan tanggungjawab dan kapasitasnya untuk memastikan bahwa proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik, dimana salah satu indikatornya adalah perbaikan pelayanan publik dasar

berbasis standar. Bagaimana memahami permasalahan- permasalahan tersebut dapat membantu DPRD, Pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang ingin menerapkan tata kelola yang baik, khususnya dalam meningkatkan kapasitas DPRD dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berstandar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara.

Adapun Bidang-Bidang yang ada di Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

**Tabel 1.1. Bidang-bidang di Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara**

No	Komisi	Bidang Program
1	Komisi E	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KetenagaKerjaan</li> <li>2. Pendidikan Umum, Pengetahuan dan Teknologi</li> <li>3. Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>4. Agama</li> <li>5. Kebudayaan</li> <li>6. Sosial</li> <li>7. Kesehatan dan Keluarga Berencana</li> <li>8. Peran Wanita</li> <li>9. Transmigrasi</li> </ol>

**Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Untuk memaksimalkan Implementasi tugas pokok dan fungsi maka DPRD memiliki fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi antara lain:

1. Legislasi merupakan wujud dalam membuat peraturan-peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. *Budgeting* merupakan wujud dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
3. Pengawasan merupakan wujud dalam bentuk pengawasan atau *controlling* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Undang-Undang dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Namun sering di temukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum maksimal, Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dan menjadi problem yang sering di temukan dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat diantaranya adalah:

1. Tidak efektif, efisien dan produktifnya Fungsi legislasi, budgeting, controlling.

Ketiga tugas dan Fungsi ini adalah parameter dan barometer dari DPRD Dalam melaksanakan program- program yang adil dan berkualitas dalam melaksanakan pelayanan publik. Diharapkan dapat mendorong pelayanan publik yang baik sehingga sinergis dengan terciptanya *Good Governance*. Hal ini lah yang ingin kita lihat di dalam Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2. Tidak Optimalisasi Fungsi DPRD dalam rangka peningkatan Program Kerja.

Proses optimalisasi ini menyangkut bagaimana konsistensi dari komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) dalam melaksanakan program kerja. Dalam hal ini juga kita ingin melihat bagaimana Komisi E DPRD Sumatera Utara dalam melaksanakan 9 program kerja yang menyangkut Bidang Kesejahteraan Rakyat.

3. Tidak adanya keterlibatan para pihak dalam pengawasan pelayanan publik. Peran dari *stakholder* dalam pengawasan pelayanan publik itu penting apalagi menyangkut bagaimana bentuk Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat apalagi menyangkut penganggaran. Pengawasan DPRD terhadap perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan dan pelaporan perangkat daerah berbasis SPM itu penting sesuai dengan standarisasi prosedur. Karena semua keterlibatan dari beberapa kelompok kepentingan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Dari ketiga contoh permasalahan yang *domain* yang dilaksanakan ialah bagaimana agar program-program Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Utara dapat berjalan dengan efektif, efisien dan produktif.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tugas adalah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, pekerjaan yang dibebankan, maupun perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dari sudut pandang organisasi, pelaksanaan tugas-tugas didefinisikan sebagai perwujudan dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi sebagai upaya dalam pencapaian tujuan.

Adapun Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:

1. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah.
2. Membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan bersama.
3. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
4. Mengusulkan pendapat dan pertimbangan kepala daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
6. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
7. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur.

Maka dari itu, Kaitan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu kita ketahui dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas

hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurut (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2) Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan menurut (Badan Pusat Statistik Indonesia 2007) suatu kondisi dimanaseluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhisesuai dengan tingkat hidup.

**Tabel 1.2. Beberapa indikator dalam melihat Indeks Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara**

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,13	75,55	75,67	75,80	75,93
2	Harapan Hidup	67,81	67,94	68,04	68,29	68,50
3	Harapan Lama Sekolah	11,97	12,41	12,61	12,82	13
4	Kemiskinan	1.421.40	1.400.40	1.416.40	1.360.60	1.508.18
5	Pengangguran	6.28 %	6.45%	6.71%	5.84%	5.60%

**Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara,2016**

Dari data yang di jumpai, beberapa indikator diatas merupakan pengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan di Sumatera Utara. Dengan tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran yang mengalami sedikit penurunan, Harapan Sekolah yang mengalami kenaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan. Dan beberapa indikator- indikator pendukung lainnya dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini dilakukan agar dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menanggulangi beberapa indikator penting diatas dalam pembangunan kesejahteraan di Sumatera Utara. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kepentingan masyarakat di Sumatera Utara, ini merupakan salah satu masalah yang klasik yang harus diperhatikan para *stakeholder* di Sumatera Utara untuk lebih mengakselerasikan kebutuhan masyarakat ini untuk membuat suatu peraturan yang dapat menguntungkan dan sesuai dengan tingkat pengharapan bagi masyarakat Sumatera Utara.

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas,2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana implementasi tugas pokok dan fungsi dari Komisi E DPRD Sumatera Utara dalam aspek kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat di Sumatera Utara. Maka, Penulis berencana melakukan sebuah penelitian yang berjudul:

**“ IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI E DPRD SUMUT TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI SUMATERA UTARA”**

**A. Rumusan Masalah**

Masalah-masalah yang timbul pada waktu implementasi dapat juga berkaitan erat dengan kekurangan informasi pada objek-objek kebijakan. Masalah muncul karena tidak tercapainya keseimbangan antara sesuatu yang diharapkan berdasarkan teori-teori dan hukum yang menjadi tolak ukur dengan kenyataan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa demikian dan apa sebabnya demikian. disamping itu masalah dapat muncul juga karena keraguan tentang keadaan sesuatu sehingga ingin diketahui lebih lanjut secara mendalam dan objektif.

Menurut Arikunto (2010:69) masalah dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari karena menjumpai hal-hal atau didorong oleh keinginan meningkatkan hasil kerja apa saja.

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat difokuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD Sumatera Utara terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara?

## **B. Tujuan Penelitian**

Hakikat dari penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan dilakukan setelah adanya identifikasi dan perumusan masalah. Oleh karena itu Sugiyono (2010:290) menjelaskan bahwa tujuan penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD Sumatera Utara terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara?

## **C. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, Adapun manfaat penelitian tersebut ialah :

- a. Di Harapkan melalui penelitian ini, didapatkan gambaran secara utuh mengenai bagaimana tugas pokok dan fungsi DPRD khususnya DPRD Sumatera Utara dalam menyerap aspirasi dan juga dalam membangun partisipasi masyarakat.
- b. Di harapkan juga dapat ditemukan korelasi yang jelas antara penyerapan aspirasi dengan partisipasi masyarakat sehingga dapat di jadikan umpan

balik bagi DPRD Sumatera Utara khususnya dalam merumuskan serta meningkatkan peran dan fungsinya terkait dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

- c. Merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan adalah secara sistematis dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini berisikan landasan teori yang berupa penjabaran teori-teori yang mendukung perumusan hipotesa serta sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian lainnya. Di dalamnya juga terdapat hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Terdiri dari: Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Deskripsi Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari: Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Terdiri dari: Simpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

Uraian Teoritis yang berkaitan substansi pokok pembahasan dalam suatu penelitian ilmiah yang sangat dibutuhkan sebagai landasan berfikir untuk memudahkan dalam mencari solusi ataupun alternatif dalam memecahkan masalah-masalah yang ada. Melalui kerangka teori maka dapat disimpulkan dan menjadi acuan berfikir dalam menghadapi fenomena sosial yang ada saat ini. Teori-teori ini akan menjadi landasan dalam menganalisa permasalahan yang diteliti meliputi:

#### **A. Pengertian Implementasi**

Menurut Deddy (2016:36) Implementasi adalah tahapan yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Adapun proses pendekatan implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan 2 faktor utama yaitu internal dan eksternal. Faktor utama internal berkaitan dengan kebijakan yang akan diimplementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah berkaitan dengan kondisi lingkungan dari pihak terkait dalam implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Wahab (2001:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Prof. H. Tachjan ( 2006: 25 ) mengartikan Implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan.

Menurut Riant Nugroho (2004:163) Faktor – faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan di kelola dalam tugas-tugas :

1. Pertama adalah Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan.

Adapun konsep-konsepnya sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan struktur dengan strategi.
- b. Melembagakan srategi.
- c. Mengoperasionalkan strategi.
- d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.

2. Kedua pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya:

- a. Desain organisasi dan struktur organisasi.
- b. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan.
- c. Integrasi dan koordinasi.
- d. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia.
- e. Hak, wewenang dan kewajiban.

f. Pendelegasian.

g. Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia.

h. Budaya organisasi.

3. Faktor yang ketiga yaitu pergerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar good governance. Dengan konsep-konsepnya:

a. Efektivitas kepemimpinan.

b. Motivasi.

c. Etika.

d. Mutu.

e. Kerja sama tim.

f. Komunikasi organisasi.

g. Negoisasi

4. Faktor yang keempat adalah pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-konsepnya:

a. Desain pengendalian.

b. Sistem informasi manajemen.

c. Monitoring.

d. Pengendalian anggaran atau keuangan.

e. Audit.

## **B. Implementasi Kebijakan**

Menurut Deddy (2016:56) Implementasi kebijakan merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Selanjutnya bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

## **B. Pengertian Efektifitas**

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektifitas. Menurut Sondang (2008:4) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan.

Menurut Hamdani (2017:55) Efektifitas adalah strategi yang paling efisien tidak selalu merupakan strategi yang efektif. Efisien akan menjadi pemboros apabila tujuan akhir tidak tercapai. Andapun tujuan tercapai, masih harus dipertanyakan seberapa jauh efektifitasnya. Cara untuk mengukur efektifitas adalah dengan menentukan transferabilitas (kemampuan memindahkan) prinsip-prinsip yang dipelajari. Kalau tujuan dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat dengan strategi tertentu daripada strategi yang lain, strategi itu efisien.

## **C. Pembangunan**

Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Menurut Effendi (2002:2) Pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Menurut Rogers (dalam Agus Suryono 2001: 132) Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Adapun pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti yang dimaksud berupa:

- a) Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain.
- b) Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
- c) Prasarana sosial yaitu gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan puskesmas.
- d) Prasarana produksi saluran air.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa pembangunan itu proses perubahan kearah yang lebih baik. Hal tersebut hanya terwujud dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan merupakan suatu proses, ini

dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaannya dapat diatur berdasarkan azas skala prioritas dan suatu tahapan tertentu. Seiring dengan perkembangan mengenai konsep dan pelaksanaan pembangunan di berbagai negara. Indonesia juga mengalami pergeseran paradigma pembangunan, baik dari strategi ekonomi, strategi *people centered*, hingga pada strategi pemberdayaan masyarakat yang dikatakan suatu alternatif dari model pembangunan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan strategi dalam pembangunan daerah yang termuat dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

#### **D. Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan Sosial di Indonesia adalah sebuah (Kajian terhadap UU 11 Tahun 2009) tentang Kesejahteraan Sosial dan Teoritis Pembangunan Sosial. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional selama ini hanya menitikberatkan pada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata. Pembangunan ekonomi yang dipenuhi sistem represi dan ketertutupan telah banyak melumpuhkan fungsi utama

institusi-institusi strategis, seperti sistem hukum dan peradilan yang harus menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk menciptakan mekanisme kontrol dan keseimbangan dan system sosial untuk memelihara keharmonisan dan kedamaian.

Menurut Adon (2016:15) Pembangunan Sosial merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan manusia yang dilandasi adanya rasa keadilan, kedamaian, dan terwujudnya kesejahteraan, yaitu memenuhi kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial.

Pembangunan sosial dapat dilakukan secara individual atau perseorangan ataupun secara kolektif atau kelompok. Pembangunan sosial juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan-kekuatan yang berubah menjadi hubungan pemberdayaan antar individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosialnya.

Usaha pelaksanaan pembangunan dalam rangka memenuhi taraf kesejahteraan sosial perlu terus dikembangkan karena sebagian besar rakyat Indonesia belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diharapkan.

## **E. Kesejahteraan Sosial**

Menurut Adi (2014:8) Kesejahteraan Sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu : suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Menurut Dolgoff dan Feldstein (2003:4) Kesejahteraan sosial adalah semua intervensi sosial yang dimaksud untuk meningkatkan atau mempertahankan keberfungsian sosial manusia. Kesejahteraan sosial merupakan program-program, bantuan materi ,dan pelayanan-pelayanan termasuk undang-undang yang melandasinya untuk mencapai kondisi sejahtera. Jadi kesejahteraan sosial diartikan sebagai kegiatan-kegiatan dan bantuan materi yang diberikan berdasarkan peraturan tertentu.

Kesejahteraan sosial menurut (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2) merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan menurut (BKKBN 1992, diacu oleh Nuryani 2007) merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau

individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

Menurut Suparlan dalam Suud (2006:5) kesejahteraan sosial, menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan.

Menurut Suharto (2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Menurut Suharto (2009:1) pengertian kesejahteraan sosial sebagai berikut : Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis

menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada.

Sejalan dengan itu menurut Adi (2003: 41) kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu :

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan dimana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Adapun penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif, dengan melihat dan melakukan penelitian dengan lokasi yang telah ditentukan dengan mengkaji dan menganalisis sesuai dengan fakta yang di temukan di lokasi penelitian. Disamping itu, dengan melakukan observasi penelitian ini juga mengelola data sekunder guna menjadikan validitas data yang dibutuhkan. Metode ini biasanya melakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

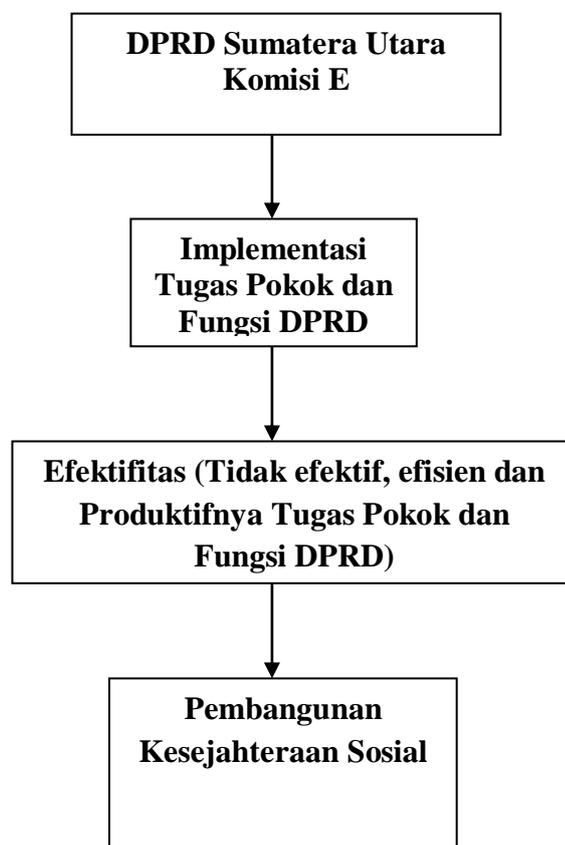
Menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kirk dan Miller yang mendefinisikan kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam pengetahuan ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

#### **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.

Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dibab tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Adapun kerangka konsep pada penelitian ini ialah :



**Gambar 3.1. Kerangka Konsep**

### **3. Defenisi Konsep**

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam

golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa).

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan di teliti.

- 1) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.
- 2) Implementasi Keijaksanaan adalah tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
- 3) Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana yang dapat dicapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi dapat dikatakan efektifitas apabila diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan, atau dapat membawa hasil. Ketika kita memutuskan tujuan, maka efektifitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula kegiatan tersebut. Ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Maka suatu perusahaan atau organisasi pemerintah harus melakukan pengukuran

terhadap kualitas pelayanan yang telah disajikan. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik.

- 4) Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pada dasarnya dalam negara berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variabel-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan.
- 5) Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Pendekatan pembangunan sosial untuk kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah permasalahan sosial terkait dengan pembangunan ekonomi, proses perubahan bergerak maju secara alami dan bertujuan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial.

Pembangunan Kesejahteraan sosial merupakan proses yang lebih bersifat intervensi. Ini berarti bahwa pembangunan sosial dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat adanya distorsi dari pembangunan itu sendiri. Distorsi dari pembangunan ini sendiri akan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dan pembangunan sosial inilah yang akan menyelesaikan distorsi dari pembangunan tadi.

Proses dari pembangunan sosial yang dilakukan tidak terlepas dari pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan sosial tidak akan terlepas dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembangunan sosial hanya akan tercapai jika pembangunan ekonomi berkembang.

Pembangunan sosial yang dilakukan harus melibatkan berbagai macam disiplin ilmu khususnya ilmu sosial. keberhasilan pembangunan sosial tidak akan terlepas dari peran politik dan ekonomi dari suatu negara. Selain itu juga pembangunan sosial sangat dipengaruhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

- 6) Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa teroganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada.

- 7) Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu.

Tugas adalah pekerjaan yang tanggungjawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu. Adanya suatu pekerjaan merupakan kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. Tanpa organisasi tidak mungkin seseorang dapat pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah disini adalah tugas yang diberikan atasan kepada bawahan sebagai tanggungjawab suatu jabatan/ bidang dalam organisasi. Dengan demikian, dapat menarik kesimpulan bahwa tugas adalah pekerjaan seseorang dalam organisasi atas pemberian dalam jabatan. Sehingga dalam melakukan tugasnya, seseorang perlu memahami tugas dan fungsi kerja dalam jabatan tersebut. Selain itu dalam melakukan tugas sebagai tanggungjawab dalam jabatan organisasi. Anda perlu kerja sama

dengan bidang – bidang (seksi - seksi) lain. Dalam melakukan tugas, setiap bidang dalam organisasi memiliki garis koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

- 8) Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Fungsi bahasa secara umum adalah untuk melakukan komunikasi antar individu ataupun antar kelompok, bahasa juga sebagai alat pemersatu dari sekian banyaknya suku dan budaya. misalnya, bahasa indonesia dengan bentuk negara yang berpulau-pulau sehingga banyak bermunculan bahasa daerah sehingga orang indonesia menggunakan bahasa indonesia sebagai alat komunikasi supaya dapat mengerti satu sama lain yang dapat mempersatukan mereka dimana pun berada.

- 9) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

#### **4. Kategorisasi**

Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Program

- 2) Pengawasan
- 3) Pertanggungjawaban

#### Pembangunan Kesejahteraan Sosial

- 1) Partisipasi Masyarakat
- 2) Sistem Pemberdayaan
- 3) Peningkatan Kesejahteraan

### **5. Informan atau Narasumber**

Narasumber/informs adalah orang yang memberikan informasi. Dalam penelitian kualitatif, penelitian melakukan wawancara yang berterus terang artinya tidak sembunyi-sembunyi, yakni narasumber/informasi peneliti yang mengetahui betul untuk kepentingan apa informasi yang ia berikan.

Adapun narasumber yang membantu hingga selesainya skripsi ini adalah :

1. Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si (Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT)
2. Bapak IR. H. ZAHIR, MAP (Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT)
3. Bapak Eka Nisa Hendrawan (Anggota Partai Golkar Kota Medan)
4. Ibu Khairul Badriah SE (Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan Area)
5. Bapak Ahmah Juwaini Prasetia Nasution SM (Masyarakat Jalan Kamboja 4 No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah)

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer, Data ini dikumpulkan dengan menggunakan:

a) Observasi

yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui dan mengamati keadaan kehidupan dilokasi, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui obyektivitas dari kenyataan yang akan ada tentang keadaan kondisi obyek yang akan diteliti. Observasi ini tugas yang memerlukan suatu sistem pemikiran. Tidaklah mungkin untuk mengamati dan mencatat semua hal terjadi dan jarang ada gunanya hanya untuk menulis penjelasan yang sifatnya Deskriptif atau hasil pengamatan yang diperoleh.

Menurut Maleong (2000:125) teknik observasi atau pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya didalam pengumpulan data penelitian, dengan data hasil pencatatan terhadap kata-kata dan tindakan.

b) Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Dimana peneliti melakukan komunikasi langsung dengan subjek atau informan secara mendalam, utuh dan rinci dengan tujuan mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

Menurut Lofland dalam Maleong (2000:112) yaitu sumber data utama ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan data pendukung lainnya. Data dalam bentuk kata-kata dan tindakan tersebut, diperoleh dengan melakukan wawancara.

c) Data sekunder

Data ini dikumpulkan melalui penelusuran atau studi pustaka dari berbagai arsip-arsip penelitian, artikel-artikel, dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian ini. Data sekunder ini merupakan pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku, untuk mendukung penelitian.

## **7. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan metode menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi tentang fokus masalah yang diteliti. Secara lebih rinci, berikut akan diuraikan bagaimana tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa penelitian kualitatif:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan proses untuk memudahkan analisis data agar melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Setiap proses analisis data saling berhubungan dan senantiasa dilakukan dalam waktu bersama.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan grafik, jaringan, tabel, dan bagan yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman peneliti terhadap

informan yang diperoleh. Data yang sudah diolah, agar mudah dibaca dan dimengerti oleh orang lain atau pengambil keputusan.

### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Penarik kesimpulan dengan tujuan untuk mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, yang mungkin alur sebab-akibat dan proposisi.

## **8. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan sejak awal Januari hingga akhir Januari, sehingga waktu yang digunakan dalam penelitian ini Selama satu bulan. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Sumatera Utara tepatnya di komisi E yang menangani bidang kesejahteraan rakyat yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.5 Medan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

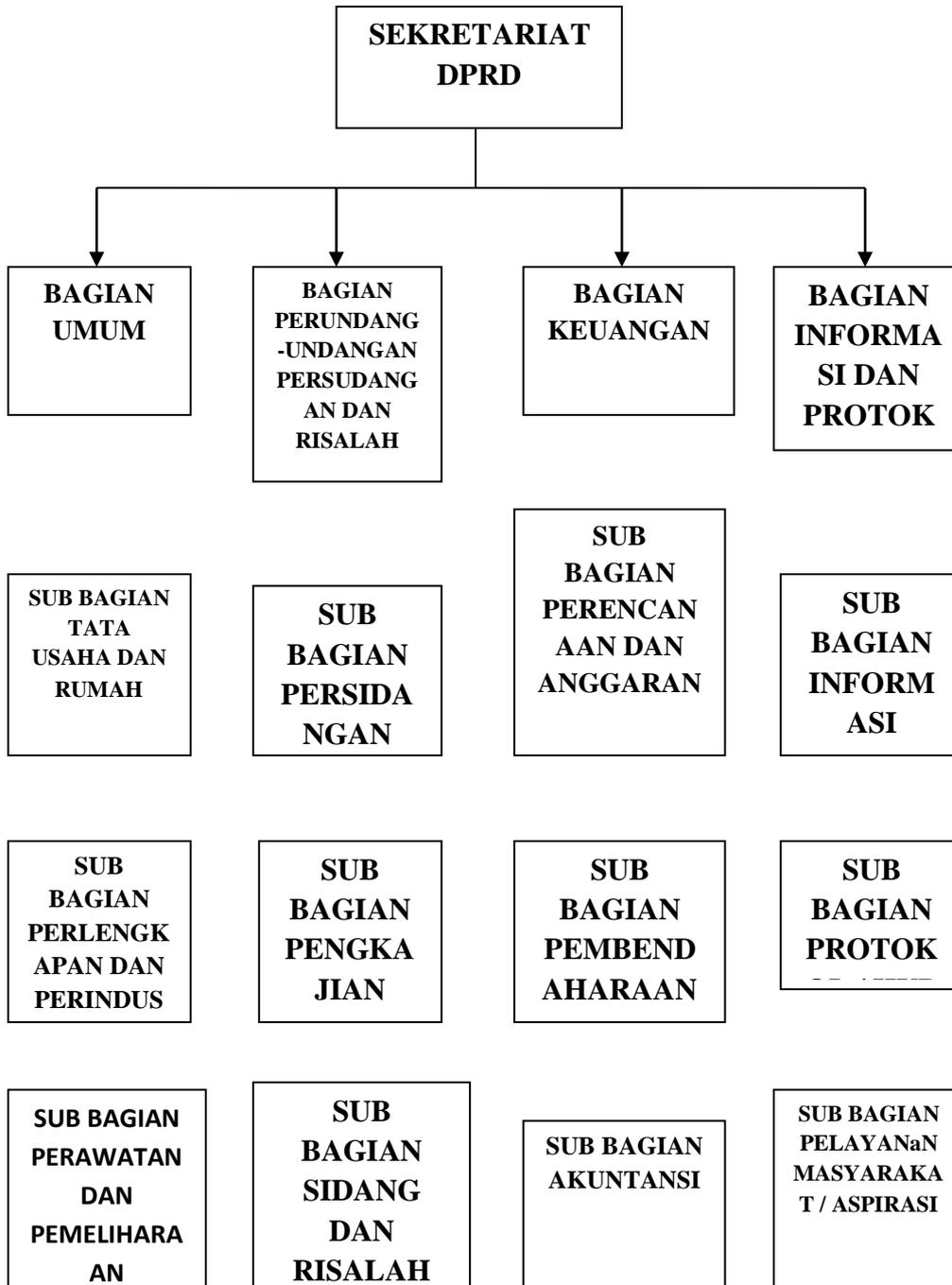
##### **1. Gambaran Umum DPRD Sumatera Utara**

Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggota – anggotanya berasal dari masing – masing sub propinsi terdahulu. Dengan Undang – Undang No 24 / 1956 dibentuklah Propinsi Aceh dibekas Keresidenan Aceh, dengan demikian Propinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli.

Sebagai Pelaksanaan Undang – Undang No. 10 / 1974 dan Undang – Undang Tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 42 / 1948. Maka komisariat ini menjalankan tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas – tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasan.

Adapun Komisi-Komisi di DPRD Provinsi Sumatera Utara terbentuk 5 Komisi yang membidangi masing-masing diantaranya Komisi A bidang Pemerintahan, Komisi B bidang Perekonomian, Komisi C bidang Keuangan, Komisi D bidang Pembangunan, Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat.

**Gambar. 4.1** Bagian Struktur Organisasi Sekretariat Dprd Sumatera Utara



Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Utara

Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara Sendiri terletak di Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan Petisah

**Gambar. 4.2 Bagian Depan DPRD Provinsi Sumatera Utara**



**Sumber : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara**

## **2. Tugas Pokok**

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:

- a) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah.
- b) Membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan bersama.
- c) Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

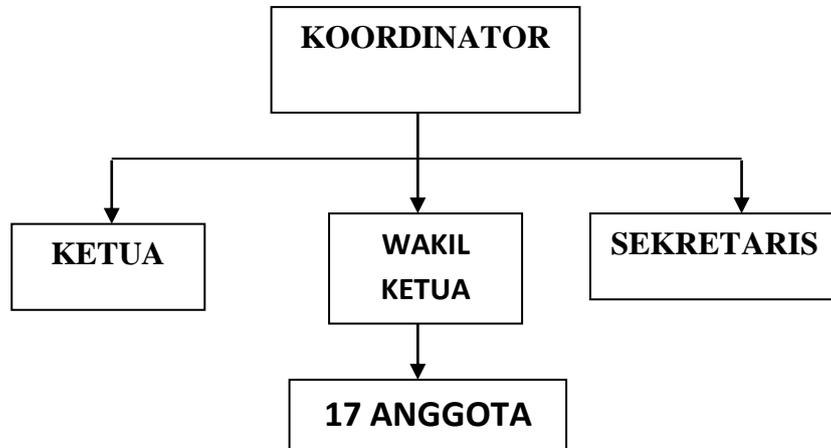
- d) Mengusulkan pendapat dan pertimbangan kepala daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- e) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- f) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
- g) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur.

### **3. Fungsi DPRD**

Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan bahwa : DPRD memiliki fungsi antarlain:

- a) Legislasi merupakan wujud dalam membuat peraturan-peraturan daerah bersama kepala daerah.
- b) Anggaran merupakan wujud dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
- c) Pengawasan merupakan wujud dalam bentuk pengawasan atau *controlling* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Undang-Undang dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### 4. Susunan Kepengurusan Komisi E



**Gambar. 4.3 Struktur Organisasi Komisi E**  
**Sumber : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara**

#### 5. Program Kegiatan

Adapun Rencana Program Komisi E DPRD Sumatera Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

##### a) Berdasarkan Fungsi Legislasi

Komisi E DPRD Sumatera Utara merencanakan Program Pembentukan Ranperda antara lain:

- 1) Revisi Perda nomor 8 tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana.

Revisi Perda ini dibutuhkan mengingat adanya hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan kebencanaan secara cepat dan akurat.

- 2) Pembentukan Ranperda Ketenagakerjaan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini belum memiliki Perda Ketenagakerjaan dan belum adanya peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja rumahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanahkan bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan kewenangan pemerintah provinsi untuk itu sudah saatnya Ranperda ini dibentuk.

3) Pembentukan Ranperda Tentang Keolahragaan

Ranperda ini dibutuhkan dalam rangka agar pembinaan olah raga di Sumatera Utara dapat lebih fokus, terarah dan didukung dengan pendanaan yang cukup sehingga prestasi olah raga Sumatera Utara dapat mencapai prestasi Nasional dan Internasional.

4) Pembentukan Ranperda Tentang Pelayanan Kesehatan

Ranperda ini perlu dibentuk mengingat banyaknya masalah pelayanan kesehatan yang diterima pasien/keluarga pasien dan pengaduan masyarakat ke Komisi E DPRD Sumatera Utara antara lain:

- a) Profesionalisme Tenaga Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit.
- b) Kurangnya Sarana Prasarana Kesehatan.
- c) Rendahnya Etika Tenaga Kesehatan melayani Pasien
- d) Anggaran Pelayanan Kesehatan masih rendah
- e) Kesejahteraan Tenaga Kesehatan masih rendah

5) Melakukan Studi Banding dan konsultasi 12 kali keluar provinsi.

6) Melakukan Sosialisasi Ranperda kepada para pemangku kepentingan ( Stakeholder) 12 kali.

**b) Program berdasarkan Fungsi Anggaran**

Program berdasarkan fungsi Anggaran ini Komisi E DPRD Sumatera dihadapkan pada posisi dilematis, disatu sisi ingin meningkatkan Anggaran semua

SKPD mitra kerja disisi lain ada keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).

Untuk itu Komisi E DPRD Sumatera Utara membuat skala prioritas peningkatan Anggaran untuk :

1. Peningkatan Anggaran Pendidikan mendekati 20% diluar dana BOS dan DAK mengingat pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
2. Peningkatan Anggaran Kesehatan mendekati 10% untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan,peningkatan sarana prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dan memperluas kesempatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
3. Peningkatan Anggaran Sosial dan Kesejahteraan dalam rangka untuk menurunkan Angka kemiskinan dan kerawanan sosial melalui bantuan sosial dan hibah.
4. Peningkatan Anggaran Kebencanaan mengingat Sumut memiliki 12 jenis potensi bencana dan sampai saat ini bencana gunung Sinabung belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
5. Peningkatan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan motto "Membangun Desa adalah membangun Kota dan Bangsa" sesuai dengan Nawacita membangun dari pinggiran.
6. Peningkatan Anggaran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengupayakan pertumbuhan penduduk mendekati 1% agar tercipta Bonus Demografi dan bukan Dissaster Demografi.

**c) Program berdasarkan fungsi Pengawasan.**

Fungsi Pengawasan ini adalah merupakan fungsi yang sangat strategis dalam rangka mengawasi jalannya peraturan yang sudah disepakati bersama sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Untuk itu Komisi E DPRD Sumatera Utara merencanakan Program sebagai berikut :

1. Rapat kerja 4 kali setahun untuk membahas R.APBD dan P.APBD.
2. Melakukan RDP 176 kali setahun.
3. Kunjungan kerja dalam daerah 24 kali setahun.
4. Kunjungan kerja luar provinsi 12 kali setahun.
5. Rapat Internal [Komisi E DPRD Sumatera Utara 24](#) kali setahun.
6. Study Banding ke Luar Negeri.
7. Pengawasan pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan 8 Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pendanaan Pendidikan, Dewan Pendidikan Provinsi, Komite Sekolah dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi.
8. Pengawasan pelaksanaan Peraturan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, INACBG, BPJS Kesehatan, Rujukan Berjenjang, Rumah Sakit Regional dan Wajib kerja Dokter Spesialis di daerah.
9. Pengawasan pelaksanaan Peraturan yang berkaitan dengan penanganan bencana.

10. Pengawasan pelaksanaan Peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti hak-hak normatif, BPJS Ketenagakerjaan dan Outsourcing.
11. Pengawasan pelaksanaan Peraturan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan Sosial dan hibah.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan observasi, Dokumentasi dan wawancara yang dilakukan. Maka Penulis dapat melakukan pembahasan sebagai berikut :

### **1. Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **a) Program**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan bahwasannya dalam pelaksanaan Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatra Utara ini tidak lepas dari Tugas Pokok dan Fungsi sebagai DPRD itu sendiri yang mempunyai 3 Fungsi.

Fungsi Legislasi yaitu membuat peraturan Daerah, Fungsi *budgeting* yaitu menganggarkan program-program di APBD, Fungsi Pengawasan yaitu mengawasi jalannya pemerintahan Sumatera Utara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Peraturan yang ada, serta perencanaan yang sudah ditetapkan di APBD. DPRD menyerap aspirasi masyarakat melalui reses, Reses DPRD itu dilakukan dengan caramenjumpi masyarakat. Tujuannya, untuk mendapatkan

informasi tentang pembangunan atau sektor yang ingin dibangun. Waktu reses dilakukan satu minggu ke depan, Selanjutnya Anggota DPRD memberi masukan ke Pemerintah yang akan dimasukkan ke dalam APBD.

Selanjutnya tahap legislasi dan setelah dilakukannya reses maka selanjutnya secara teknis hasil reses tersebut kemudian dibahas dalam komisi E sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pokok-pokok pemikiran tersebut di kumpulkan bersama SKPD dinas-dinas untuk dijadikan usulan dalam program APBD dan di tampung dalam APBD tersebut yang kemudian dijalankan oleh pemerintah. Fungsi itu masuk ke dalam anggaran APBD yang disebut sebagai fungsi *budget* atau penganggaran.

Peran DPRD dalam menganggarkan program-program yang dianggap penting untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat melalui sarapan reses. Setelah selesai proses secara teknis tentang fungsi penganggaran maka hasil reses dan rapat dengan SKPD maka dapat di rancang menjadi RAPD yang kemudian menjadi APBD oleh pemda provinsi Sumatera Utara di Dinas-dinas di SKPD. Jadi Fungsi komisi E hanya untuk mengawasi jalannya peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan mitra kerja, apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak, sudah sesuai aturan atau tidak.

Fungsi Pengawasan dilakukan melalui laporan masyarakat, kunjungan kerja dan Rapat Dengar Pendapat, selanjutnya hasil pengawasan ini disampaikan kepada SKPD dan Kementerian. Sedangkan DPRD hanya mengawasi jalannya program yang sudah ditetapkan untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat, apabila diperlukannya payung hukum melalui peraturan daerah untuk

membuat peraturan-peraturan atau kebijakan tertentu maka DPRD kemudian mengusulkan hak inisiatif untuk melakukan peraturan Daerah.

Setelah dijalankan program menyetujui RAPBD menjadi APBD dan disusun kembali oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan SKPD terkait, maka selanjutnya pemerintah Provinsi dan SKPD bertanggungjawab kepada DPRD untuk di Audit dalam proses Anggaran. Seperti program pelayanan kesehatan dan keolahragaan untuk Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara.

Menurut Bapak Ikrimah hal yang paling penting diperhatikan oleh pemerintah Provinsi, SKPD dan DPRD dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ialah memperhatikan sarana dan prasarana yang menjadi tanggungjawab Provinsi Sumatera Utara ialah sekolah tingkat menengah seperti: SMA, SMK, STM, dan lain-lain. Selanjutnya SD dan SMP merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah wilayah kabupaten atau kota.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Zahir, MAP. selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT Beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatra Utara ini penyelesaiannya harus *komprehensif*, tidak hanya di sektor tertentu saja tetapi pentingnya di sektor pelayanan publik, sektor infrastruktur, sektor pendidikan, bantuan-bantuan tunai untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dilakukan oleh dinas sosial saja yang menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial ini.

Dengan pelaksanaan pembangunan dalam sektor kesejahteraan masyarakat secara komprehensif maka Komisi E DPRD Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi harus dapat bekerja sama dengan baik. Maka ada tiga tugas pokok dan fungsi DPRD yang harus dilaksanakan dalam tanggungjawab fungsi legislasi untuk menjalankan program kesejahteraan masyarakat yang diusulkan DPRD.

Dalam proses legislasi program-program yang dijalankan pemerintah belum dapat dikatakan berhasil, sebab masih banyak informasi dan temuan di lapangan. Masih banyak informasi-informasi bahwa ada pungli-pungli. Misal ada *Grativikasi* seperti kasus Bansos atau bantuan sosial di Sumatera Utara yang ada melibatkan anggota DPRD dan SKPD di Sumatera Utara di tahun 2015-2016.

Oleh karna itu belum bisa mengatakan bahwa program pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu berhasil. Kemudian juga percepatan pembangunan, khususnya menurunkan angka sektor kemiskinan tidak signifikan, tapi boleh juga diaspresiasi karna ada juga keberhasilan-keberhasilan atau ada peningkatan-peningkatan tapi dengan kekurangannya anggaran masih banyak hal yang harus diperbaiki di Provinsi Sumatera Utara ini. Seperti infrastruktur masih banyak yang rusak, jalan yang perbaikan dikarenakan oleh faktor pada tahun 2014-2016.

#### **b) Pengawasan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan bahwa Pengawasan yang dilakukan Komisi E DPRD Setelah di Implementasikan Tugas Pokok dan Fungsi dalam upaya sistem pengawasan dilapangan terkait program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Komisi E mengundang dinas-

dinas terkait, yaitu dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan dan lain-lain untuk di paparkan program masing-masing.

DPRD Komisi E hanya melihat dan mencermati program yang mereka paparkan. Apabila ada keraguan atau ingin mengkonfirmasi kebenaran dari yang mereka lakukan, maka pemerintah daerah dan SKPD Komisi E akan melakukan kunjungan kerja ke lapangan atau ke daerah tempat reses sesuai dengan lokasi pemilihan guna melihat bagaimana *progres* yang sebenarnya dilakukan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Zahir, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi E DPRD setelah dilakukan dan dilaksanakannya Implementasikan Tugas Pokok dan Fungsi anggaran dewan Komisi E dalam pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat, maka upaya yang dilakukan selanjutnya ialah melakukan controlling di daerah-daerah yang menjadi wilayah reses. Seperti wilayah medan-tebing tinggi pembangunan jalan tol, pembangunan Andenpass( H. Nasution Medan), Danau toba simalungun dan wilayah lainnya di Sumatera Utara.

Selanjutnya perlu ditegaskan dan bantuan dari pakar dan praktisi bidang sosial seperti gender dan anak praktisi wanita dan perencanaan infrastruktur fakar perencanaan ( Development Planner). Instrumen yang dapat digunakan yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

**c) Pertanggungjawaban**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD, Beliau mengatakan bahwa bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai DPRD baik dalam proses legislasi, pengawasan dan penganggaran, hal yang dilakukan berdasarkan hasil tersebut, sehingga program tersebut dapat teralikatif dengan baik.

Kemudian ada pertanggung jawaban sesuai dengan struktur organisasi sekretariat DPRD Sumatera Utara seperti:

- 1) Bagian umum (Tata usaha rumah, industri perlengkapan, pemilihan dan perawatan)
- 2) Keuangan (Perencanaan anggaran, pembendaharaan, dan Akuntansi)
- 3) Bagian Informasi dan Protokol (Informasi, Protokol, pelayanan masyarakat dan Aspirasi)
- 4) Perundang-undangan di Risalah (Persidangan, pengkajian, dan Risalah)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. H. Zahir, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT, Beliau mengatakan bahwa mengimplementasikan program tugas pokok dan fungsi DPRD SUMUT untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan bantuan langsung seperti banjir di dua daerah yaitu daerah sinabung dan karo. Selain memberikan bantuan langsung Komisi E DPRD di bidang sosial juga memberikan pelayanan infastruktur dan kesehatan yang baik dan terjamin.

Pertanggungjawaban yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT setelah diimplementasikan Program Tugas Pokok dan Fungsi DPRD SUMUT serta sistem pertanggungjawabannya dengan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial itu tidak hanya dengan bantuan-bantuan langsung tapi dengan memberikan pelayanan yang baik kepada mereka, memberikan pelayanan infrastruktur, kesehatan. Makadari itu dengan perlahan akan meningkat kesejahteraan.

## **2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial**

### **a) Partisipasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan bahwasannya bentuk Partisipasi yang dilakukan Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utaraialah meningkatkan taraf hidup dengan pendidikan dan pekerjaan, diantaranya rata-rata msyarakat harus dapat memiliki aktivitas dari pemerintah yang layak, sehingga tidak dapat terjadi penganggurana di Sumatera Utara.

Adapun dorongan dari bawah agar mempunyai minat untuk pendidikan yang lebih tinggi dengan keahlian yang bagus guna memiliki pekerjaan yang bagus.Supaya masyarakat dapat memanfaatkan pendidikan untuk aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan karena investasi pendidikan salah satunya merupakan modal penting dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. H. ZAHIR, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT.Beliau

mengatakan bahwasannya bentuk Partisipasi Masyarakat dan investasi pendidikan di Kota Medan dominan terlihat perbaikan pendidikannya. Diantaranya di Kota-kota di Sumatera Utara seperti Kota Medan, Binjai, Tebing tinggi dan Pematang Siantar.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui BPS bahwasannya Lima Kota tersebut memiliki *grad* atau Kota dengan nilai pertumbuhan investasi pendidikan yang bagus. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK dan jenjang sarjana. Hal itu dikarenakan semakin bertumbuh dan diperbaikinya akses dan sarana pendidikan di Kota-kota besar di Sumatera Utara.

Seperti contoh di Nias baik Kabupaten dan Kota, (Nias Barat, nduk) dan lainnya. Investasi pendidikan di daerah tersebut sudah menjalani siklus perbaikan yang cukup signifikan, dimulai dari pembangunan sarana dan prasarana, infrastruktur di Distimasi wisata, pemerintah daerah Kota di Kabupaten di nilai membaik. Investasi pendidikan kepada pemuda dan pemudi masyarakat nilai untuk dapat melanjutkan kembali pendidikan ke jenjang yang lebih baik lagi, dengan membuat beasiswa di pendanaan pendidikan langsung melalui Anggaran 20% APBN/APBD. Akan tetapi, rintangan yang dihadapi oleh Nias diantaranya adalah masalah sosiologis yang harus diperbaiki dengan meningkatkan investasi pendidikan.

**b) Sistem Pemberdayaan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan bahwasannya Pemberdayaan Masyarakat Komisi E DPRD

SUMUT dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara itu Ada, salah satu contohnya di program PKH, untuk memperbaiki Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat secara bertahap dan pelan-pelan. Tidak seperti membalikkan kedua telapak tangan, butuh proses dan di perlukan kesabaran dalam membina masyarakat ini khususnya dilapisan masyarakat menengah kebawah yang pendidikan nya kurang untuk bisa sadar sehingga mereka mau mendorong dirinya sendiri supaya lebih maju.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. H. Zahir, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT.untuk memperbaiki Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Komisi E DPRD SUMUT dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara Ada, Salah satu faktor untuk dapat meningkatkan sistem pemberdayaan itu sendiri perlu memperbaiki dirinya. Jadi utama dari diri masyarakat itu sendiri. Di bangun kesadaran, di dorong kesadarannya untuk merubah dan memperbaiki dirinya maka disitulah perlunya pendamping-pendamping di Program PKH itu, jangan masyarakat itu diberi bantuan uang lalu ditinggal pergi, uang akan habis sebentar saja.Masyarakat apabila diberi apa pun kalau tidak ada kepedulian terhadap dirinya sendiri maka tidak akan bisa maju karena Pemberdayaan menjadi hal yang sangat penting agar nantinya masyarakat bisa mandiri tanpa perlu lagi diarahkan atau dituntun oleh Pemerintah atau para agen perubahan.

**c) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD

SUMUT. Beliau mengatakan bahwasannya Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pembangunan Kesejahteraan di Sumatera Utara ini yaitu:

- 1) Pendidikan, semakin meningkat pendidikannya biasanya itu berkolasi positif dengan peningkatan kesejahteraan
- 2) Penghasilan, semakin tinggi penghasilan perkapita masyarakat maka kesejahteraannya akan semakin bagus.
- 3) Usia harapan Hidup, semakin tinggi rata-rata usia harapan hidup masyarakat biasanya kesejahteraannya juga akan lebih tinggi, contohnya di Jepang
- 4) Konsumsi Gizi, jika rata-rata konsumsi gizi meningkat di suatu Negara atau daerah biasanya kesejahteraannya juga meningkat
- 5) Ginik rasio kecil (jurang kesejahteraan antar masyarakat), semakin kecil ginik rasio maka pemerataan kesejahteraan itu semakin merata, jadi misalkan dari 10 orang yang kaya hanya 1 orang saja, dan 9 lainnya miskin. Jadi kalau ginik rasio nya besar artinya ekonomi itu hanya terpusat pada satu dua orang saja.

Itulah kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan itu, kita hanya bisa melihat dari rata-rata, tidak bisa kita melihat dari perorangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. H. Zahir, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan bahwasannya Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pembangunan Kesejahteraan di Sumatera Utara sudah ada ketentuannya

berdasarkan data yang diperoleh dari BPS(Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Utara.

Dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara ialah Penghasilan perkapita, kelayakan konsumsi dan tingkat hunian yang layak huni. Indikator-indikator inilah yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

Tidak ada strategi khusus yang dilakukan Komisi E oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, fokus komisi E hanya pada Tugas Pokok dan Fungsi DPRD. Yang membuat strategi dalam mengstasi masalah Peningkatan dan Pembangunan Masyarakat adalah Pemda Provinsi Sumatera Utara, setelah ditetapkan untuk program, kemudian DPRD melakukan Pengawasan. DPRD hanya mealui rapat dan pertemuan-pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mendengarkan bagaimana cara kerjanya, jika menurut DPRD logis maka dipeganglah dokumen anggran.

### **3. Wawancara dengan beberapa diwilayah Sumatera Utara( Masyarakat Medan)**

- Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul Badriah, SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan Area. Beliau mengatakan bahwasannya dalam Program yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara selama ini pengawasan yang dilaksanakan seperti reses yang menerima dan meminta masukkan atas

saran dan aspirasi oleh masyarakat dengan waktu yang biasanya tidak tepat berada di lokasi yang sama dengan berlangsung dilaksanakan pada bulan, jam sampai dengan tahun dilaksanakan sekali dalam setahun.

➤ Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ahmah Juwaini Prasetya Nasution, SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia. Beliau mengatakan bahwasannya program yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini sudah ada khususnya bisa dilihat dari Program-program yang dilakukan seperti:

- 1) Bidang pendidikan : Reses, datangnya komisi E ke salah satu sekolah di SMA Helvetia melalui situasi sarana dan prasarana, Melakukan sosialisasi pendidikan dini dan aspirasi pelayanan masyarakat
- 2) Bidang Kesehatan : Bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk bersosialisasi langsung tentang bahaya penyakit menular HIV/AIDS, Gender, dan melihat sarana dan prasarana seperti puskesmas dan lainnya

Tetapi proses sosialisasi dan pemecahan masalah yang dilakukan atas Tugas Pokok dan Fungsi oleh anggota DPRD Komisi E masih belum dikatakan maksimal oleh masyarakat di Kota Medan.

➤ Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul Badriah, SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan

Area. Beliau mengatakan bahwasannya dalam Pembangunan yang di inginkan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini khususnya Pendidikan dan Kesehatan. Terutama Kesehatan, contohnya ada program BPJS yang pelaksanaanya di lapangan banyak yang terkendala karna tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Selanjutnya penyakit-penyakit tertentu yang tidak di *cover*, sementara hal itu menyentuh pada kepentingan masyarakat. Seharusnya tidak memilah milih terhadap penyakit apa saja yang dialami masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Dengan adanya kartu BPJS harusnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berperan sebagaimana mestinya.

- Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ahmah Juwaini Prasetia Nasution SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah. Beliau mengatakan bahwasannya dalam Pembangunan yang di inginkan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini dengan memberi fasilitas pendidikan yang baik. baik dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kemudian mengharapakan kesehatan-kesehatan juga ditingkatkan seperti kinerja puskesmas-puskemas yang ada lebih ditingkatkan di Sumatera Utara.
- Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul Badriah,SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan Area. Beliau mengatakan bahwasannya Pengawasan Program yang

dilakukan Komisi E dalam pengawasan Programnya Tidak mengetahui, karena yang menjalankan program tersebut pemerintah dan yang mengawasi DPRD. Tidak bisa melihat secara langsung kapan dan bagaimana anggota DPRD ini turun kelapangan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya. Mungkin ada di lokasi-lokasi atau sekolah-sekolah tertentu.

- Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ahmah Juwaini Prasetia Nasution SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah. Beliau mengatakan bahwasannya Pengawasan Program yang dilakukan Komisi E dalam pengawasan Programnya kurang disaat *contoling* karena bisa dilihat di Sumatera Utara ini masih banyak masalah. Seperti masalah pendidikan masih banyak anak-anak yang tidak sekolah hingga bekerja di usia dini, kesehatan yang sulit masyarakat untuk mendapatkan fasilitas yang baik.
- Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul Badriah,SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan Area. Beliau mengatakan bahwasannya Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini salah satunya dengan menggabungkan aspek sosial dan aspek ekonomi. Maka dengan aspek ini pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ahmah Juwaini Prasetya Nasution SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah. Beliau mengatakan bahwasannya Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera ini seperti yang di contohkan dengan pendidikan karena apabila masalah pendidikan sudah baik maka lebih mudah masyarakat untuk dapat bekerja karena mempunyai ilmu yang cukup. Hal tersebut dapat meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara menjadi meningkat dan keburukan-keburukan seperti tindakan kriminal berkurang ketika Pendidikan, Kesehatan-kesehatan sudah bagus, dan lapangan Pekerjaan juga terjamin di Sumatera Utara.
- Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul Badriah,SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan Area. Beliau mengatakan bahwasannya bentuk Partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara dengan mempunyai kesadaran akan tanggungjawab atas kondisi di lingkungan sekitar, Merubah pola pikir agar lebih mandiri dalam kehidupan dan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah serta inisiatif dalam kondisi memperbaiki kualitas kehidupannya.
- Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ahmah Juwaini Prasetya Nasution SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah. Beliau mengatakan

bahwasannya bentuk Partisipasi yang dilakukan untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini yang paling utama dengan meningkatkan pendidikan, melalui sosialisasi untuk mengajak masyarakat Sumatera Utara dengan bekerjasama dalam membangun Kesejahteraan Sosialnya masing-masing dengan memiliki *soft skill*.

- Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul Badriah, SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan Area. Beliau mengatakan bahwasannya yang diharapkan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini terhadap pemerintah lebih memperhatikan atau lebih peduli karena kurang maksimal dan tidak seperti yang diharapkan. Contohnya masalah pendidikan, artinya masih ada kutipan-kutipan diluar dari ketentuan yang ada. Seperti masalah kesehatan, seperti di Puskesmas-puskesmas setempat minimnya obat-obat yang tersedia.
- Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ahmah Juwaini Prasetya Nasution SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah. Beliau mengatakan bahwasannya harapan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini yaitu memiliki kesadaran untuk merubah suatu hal yang tidak baik menjadi baik. Kemudian bisa menjadi subjek dan objek untuk pembanguna kesejahteraan itu sendiri. Dengan menjadi subjek pembangunan dituntun agar melakukan pembangunan sebagai kewajiban

yang harus dilakukan. Sedangkan objek Pembangunan, agar menjadi pelaksana pembangunan sebagai pemberian upah dari tanggung jawabnya kemudian harus mengikuti ketentuan yang diberikan.

#### **4) Wawancara kepada Anggota Partai Politik**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Eka Nisa Hendrawan salah satu Anggota Partai Golkar Kota Medan. Beliau mengatakan bahwas Ada Anggota Partai Golkar yang menduduki sebagai Anggota Dewan di Komisi E DPRD SUMUT yaitu Bapak H. Syamsul Bahri Batubara, SH dan Bapak H. A Yasir Ridho Loebis, SH, ST, MSP

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Bapak Eka Nisa Hendrawan salah satu Anggota Partai Golkar Kota Medan. Beliau mengatakan bahwa saran yang dilakukan Partai dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara yang pertama semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya. Ketiga semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Keempat semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang Kelima semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Bapak Eka Nisa Hendrawan salah satu Anggota Partai Golkar Kota Medan. Beliau mengatakan bahwa partai harapkan terhadap Komisi E dalam meningkatkan

Pembangunan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kinerja Komisi E dalam bidangnya untuk terjun secara langsung ke lapangan atau ke masyarakat seperti yang dilakukan anggota dewan DPRD dalam masa reses. Dalam masa reses tersebutlah peningkatan untuk mengetahui aspirasi masyarakat tersebut dalam kekurangan dan kebutuhan masyarakat, terutama untuk dapil mereka masing-masing yang telah mereka janjikan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD SUMUT Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara sudah berjalan dengan semestinya, akan tetapi masih belum maksimal seperti yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Pengawasan serta tanggungjawab yang dilakukan Komisi E DPRD untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dibidangnya melalui Program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana namun masih kurang efektif karna masih kurangnya pengawasan dalam setiap program tersebut khususnya untuk Kesehatan dan Pendidikan
3. Pemberdayaan masyarakat untuk Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk maju dan berkembang sehingga tidak ada kesadaran diri sendiri dalam pola berfikir sehingga terjadinya penurunan tingkat Kesejahteraan.
4. Pelaksanaan dalam upaya meningkatkan kinerja komisi e dprd provinsi sumatera utara kedepan yang berdaya guna dan berhasil guna.
5. Upaya yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT dalam Pembangunan Kesejahteraan hanya berfokus pada Pendidikan dan Kesehatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah ditentukan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam implementasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD SUMUT Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara, sebagai berikut :

1. Diharapkan lebih maksimal lagi menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD Sumatera Utara terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara agar masyarakat puas atas kinerja yang dilakukan Komisi DPRD sebagai wakil rakyat.
2. Diharapkan Komisi E DPRD tidak hanya berfokus pada sarana dan prasarana terhadap pendidikan tetapi juga harus memperhatikan masalah-masalah kesejahteraan sosial lainnya.
3. Diharapkan DPRD Komisi E lebih meningkatkan kerjasama dengan lembaga informal masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan dalam berbagai hal yang terkait dengan aspirasi atau partisipasi masyarakat
4. Diharapkan tingkat kehadiran Pimpinan dan Anggota komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam mengikuti kunjungan kerja dapat ditingkatkan lagi dan dapat proaktif dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas demi mendorong kemajuan masyarakat sumatera utara pada masa mendatang.
5. Kepada DPRD Komisi E agar lebih memperhatikan masyarakat menengah kebawah yang tidak puas dengan program pemerintah khususnya masalah Pendidikan dan Kesehatan untuk Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adi, Isbandi Rukminto, 2013, *Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosisl, dan Kajian pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_, 2002, *Pemikiran pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan sosial*. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

\_\_\_\_\_, 2013, *Pembangunan Sosial: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers

\_\_\_\_\_, 2005, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Edisi Revisi 2005. Jakarta: FISIP UI Press

Anonim, 2013, *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers

Fahrudin, Adi, Ph.D, 2014, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, PT.Refika Aditama, Bandung

Mulyadi, Deddy, Drs, M.Si, 2016, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta

Nurman, M.Si., Ph.D, 2015, *Pembangunan Daerah*, PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta: Rajawali Pers

\_\_\_\_\_, 2015. *Kajian Pembangunan, Pekerjaan Sosial*, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta: Rajawali Pers

H.A.W.Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal1.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat 1 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41 Tentang Fungsi DPRD

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2 Tentang Kesejahteraan sosial

### **C. Makalah, Artikel, Tesis**

Aditya Diar, "*Keberadaan DPRD dan Lembaga Penelitian Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*", Artikel Hukum Bung Hatta, hal. 1. Tersedia di [www.google.com](http://www.google.com), diakses pada tanggal 23 Mei 2010

Herdi. "*Fungsi Legislasi DPRD*". Artikel Hukum Hal1. Tersedia di [www.google.com](http://www.google.com)

Irfan, "*Perbandingan Sistem Pemerintahan di Daerah*." Artikel Hukum. Tersedia di [www.google.com](http://www.google.com).diakses

Meri Yarni, "*Fungsi Legislasi DPRD dalam kerangka Otonomi*." Artikel Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. hal 2. Tersedia di [www.google.com](http://www.google.com)

Yusuf Anwar. "*Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*." KPK.Jakarta.2006. Tersedia di [www.google.com](http://www.google.com)

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Surat Permohonan Pengajuan Judul
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	:SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran IX	:Surat Keterangan Penelitian Oleh Kantor Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara

Medan,

April 2018

Aprilia Herlin

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**APRILIA HERLIN**

**1403090013**

### **PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 16 April 1995

Agama : Islam

Suku Bangsa : Jawa, Minang

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Keluarga : Anak Kandung

Alamat : Jalan.Araw No.26 RT.005 RW.002  
Kelurahan.Sumur Meleleh

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

<b>No</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Tahun Masuk</b>	<b>Tahun Keluar</b>
1.	SD NEGERI 11 KOTA BENGKULU	2001	2007
2.	SMP NEGERI 15 KOTA BENGKULU	2007	2010
3.	SMA NEGERI 06 KOTA BENGKULU	2010	2013

## **DAFTAR WAWANCARA ANGGOTA DEWAN KOMISI E**

**Nama** : H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si  
**Jabatan** : Anggota Komisi E  
**FRAKSI** : PKS

### **IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **A. Program**

- 1) Bagaimana pelaksanaan Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E SUMUT terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara?
- 2) Program-program seperti apa yang dibuat dan dirancang Komisi E DPRD SUMUT dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut?

#### **B. Pengawasan**

- 1) Pengawasan seperti apa yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT setelah di Implementasikan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut?
- 2) Bagaimana Sistem Pengawasan yang dilakukan DPRD Komisi E SUMUT dalam upaya melaksanakan system Tugas Pokok dan Fungsi tersebut?

#### **C. Pertanggungjawaban**

- 1) Pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT setelah di Implementasikan Program di Tugas Pokok dan Fungsi DPRD SUMUT?
- 2) Bagaimana Sistem Pertanggungjawaban yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut?

### **PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

#### **A. Partisipasi Masyarakat**

- 1) Bagaimana bentuk Partisipasi yang dilakukan Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara?

- 2) Partisipasi Masyarakat seperti apa yang diharapkan Komisi E DPRD SUMUT dalam membantu melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi guna meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan di Sumatera Utara?
- 3) Apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara

**B. Sistem Pemberdayaan**

- 1) Adakah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT dalam meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara?
- 2) Bagaimana system Pemberdayaan yang dilaksanakan Komisi E DPRD SUMUT?
- 3) Faktor apa saja yang dapat meningkatkan system Pemberdayaan di SUMUT?

**C. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

- 1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara?
- 2) Bagaimana strategi di Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara?
- 3) Indikator-indikator seperti apa yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Komisi E SUMUT dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara?

## DAFTAR WAWANCARA ANGGOTA DEWAN KOMISI E

**Nama** : IR. H. ZAHIR, MAP  
**Jabatan** : Anggota Komisi E  
**FRAKSI** : PDIP

### IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### D. Program

- 3) Bagaimana pelaksanaan Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E SUMUT terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara?
- 4) Program-program seperti apa yang dibuat dan dirancang Komisi E DPRD SUMUT dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut?

#### E. Pengawasan

- 3) Pengawasan seperti apa yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT setelah di Implementasikan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut?
- 4) Bagaimana Sistem Pengawasan yang dilakukan DPRD Komisi E SUMUT dalam upaya melaksanakan system Tugas Pokok dan Fungsi tersebut?

#### F. Pertanggungjawaban

- 3) Pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT setelah di Implementasikan Program di Tugas Pokok dan Fungsi DPRD SUMUT?
- 4) Bagaimana Sistem Pertanggungjawaban yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut?

### PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### B. Partisipasi Masyarakat

- 4) Bagaimana bentuk Partisipasi yang dilakukan Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara?

- 5) Partisipasi Masyarakat seperti apa yang diharapkan Komisi E DPRD SUMUT dalam membantu melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi guna meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan di Sumatera Utara?
- 6) Apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara

C. Sistem Pemberdayaan

- 4) Adakah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT dalam meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara?
- 5) Bagaimana system Pemberdayaan yang dilaksanakan Komisi E DPRD SUMUT?
- 6) Faktor apa saja yang dapat meningkatkan system Pemberdayaan di SUMUT?

D. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

- 4) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara?
- 5) Bagaimana strategi di Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara?
- 6) Indikator-indikator seperti apa yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Komisi E SUMUT dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara?

## **DAFTAR WAWANCARA ANGGOTA PARTAI POLITIK**

**Nama** : **Eka Nisa Hendrawan**  
**Jabatan** : **Anggota Partai Golkar**  
**Usia** : **38 Tahun**

1. Adakah Anggota partai Bapak/ibu yang menduduki sebagai Anggota Dewan di Komisi E DPRD SUMUT?
2. Saran seperti apa yang dilakukan Partai dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara
3. Apa yang partai harapkan terhadap Komisi E dalam meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial?

## **DAFTAR WAWANCARA MASYARAKAT**

**Nama** : **Khairul Badriah,SE**  
**Alamat** : **Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan Area**  
**Usia** : **46 Tahun**

1. Adakah program yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara?
2. Pembangunan seperti apa yang Bapak/ibu inginkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara?
3. Adakah pengawasan yang dilakukan Komisi E dalam pengawasan program tersebut?
4. Pemberdayaan masyarakat seperti apa yang Bapak/ibu lakukan untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara?
5. Bagaimana bentuk partisipasi Bapak/ibu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara?
6. Apa yang bapak/ibu harapkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara?

## **DAFTAR WAWANCARA MASYARAKAT**

**Nama** : **Ahmah Juwaini Prasetia Nasution SM**  
**Alamat** : **Jalan Kamboja 4 No.29 Kecamatan Medan Helvetia,  
Helvetia Tengah**  
**Usia** : **25 Tahun**

1. Adakah program yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara?
2. Pembangunan seperti apa yang Bapak/ibu inginkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara?
3. Adakah pengawasan yang dilakukan Komisi E dalam pengawasan program tersebut?
4. Pemberdayaan masyarakat seperti apa yang Bapak/ibu lakukan untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara?
5. Bagaimana bentuk partisipasi Bapak/ibu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara?
6. Apa yang bapak/ibu harapkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara?



Unggul, Cerdas & Terpercaya

ila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: roktor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 21 november 2017.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Aprilia Hertin
N P M : 1403090013
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Tabungan sks : 127 sks, IP Kumulatif 3,25.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

Table with 3 columns: No, Judul yang diusulkan, and Persetujuan. Row 1: Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD SUMUT Terhadap Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara. Row 2: Peranan ACT (Aksi Cepat Tanggap) dalam Pelaksanaan Program Kapal Kemanusiaan Hadapi Kelaparan di Kota Medan. Row 3: Peranan Komisi E DPRD SUMUT dalam Pelaksanaan Program BSS kepada Rakyat Miskin di Kota Medan.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- 1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

209 (circled stamp)

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

(Aprilia Hertin)

Medan, tgl. 21 november 2017.

Ketua (KPHAN JAC)

AB: Mohd Yusri



Unggul, Cerdas & Terpercaya

la menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 209 /SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2017**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tertanggal **21 November 2017** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **APRILIA HERLIN**  
NPM : 1403090013  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2017/ 2018  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI E DPRD SUMUT TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DI SUMATERA UTARA.**

Pembimbing I : Dr. Mohd. Yusri., M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa kadaluarsa tanggal: 21 November 2018 .**

Ditetapkan di Medan,  
Pada tanggal : 02 RabiulAwal 1439 H  
21 November 2017 M



Dekan

**Dr. Tasrif Syam., M.Si.**

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. Di Medan;
3. Pertiinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Medan, 28 Desember.....2011.

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Aprilia Hertin  
 N P M : 1403090013  
 Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. .... /SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI 5 DPRD SUMUT  
 TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
 DI SUMATERA UTARA

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(...MOHR, YUSRI, M.Si, M.HUM)

Pemohon,

(Aprilia Hertin)

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
Nomor : 348/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2017

Program studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Hari, Tanggal : Jum'at, 29 Desember 2017  
Waktu : 08.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU  
Pemimpin Seminar : ARIFIN SALEH, Dr, M.SP

No	Nama Mahasiswa/Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen/Panahnggab	Pembimbing	Judul/Proposal/Skripsi
6	RAHMAD RIZKY	1403090039	1 YURISNA TANJUNG, Dra, M.AP	1 MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL REHAB RUMAH TIDAK LAYAK TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL
7	MELISA OCTAVANY	1403090035	1 MOHD. YUSRI, Dr, M.SI	1 YURISNA TANJUNG, Dra, M.AP	EFEKTIVITAS PELAYAN BPJS TERHADAP PASIEN BANTUAN IURAN (PBI) DI RUMAH SAKIT UMUM SIBOLGA
8	M. AIDIL HARIYANDI	1403090007	1 MOHD. YUSRI, Dr, M.SI	1 YURISNA TANJUNG, Dra, M.AP	PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA (BPMPKS) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN PEUDAWA KABUPATEN ACEH TIMUR
9	APRILIA HERLINA	1403090013	1 MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	1 MOHD. YUSRI, Dr, M.SI	PERANAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI E DPRD SUMUT TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI SUMATERA UTARA
10	MHD. FAHMI TANJUNG	1403090042	1 MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	1 MOHD. YUSRI, Dr, M.SI	PERANAN INDUSTRI EKSTRAKTIF BERBASIS PERIKANAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA MISKIN DI WILAYAH PESISIR (Studi Kasus di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah)

Medan, 10 Rabiul Akhir 1439 H  
29 Desember 2017 M



Dekan

DISYARIS SYAM, M.SI.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kantor: M. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila merujuk surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Aprilia Herlin  
 NPM : 1403090013  
 Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
 Judul Skripsi : Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Sumut  
 Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	7 / 11 / 17	Bimbingan dan Revisi Bab I s/d III	
2	19 / 12 / 17	Bimbingan dan Revisi Bab I s/d III	
3	27 / 12 / 17	Bimbingan dan Revisi Bab I s/d III	
4	28 / 12 / 17	ACC Proposal Skripsi	
5	9 / 1 / 18	Bimbingan Panduan Wawancara	
6	7 / 2 / 18	Bimbingan dan Revisi Bab IV & V	
7	15 / 2 / 18	Bimbingan dan Revisi Bab IV & V	
8	15 / 3 / 18	Bimbingan dan Revisi Bab IV & V	
9	19 / 3 / 18	ACC Skripsi	

Medan, ..... 20 ..... Maret ..... 20 18.....

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : .....

(Drs. Jassir Syam M.Si.)

(.....)

(Dr. MOHD. YUSRI, S.Pd, M.Si)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

SK-6

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 21 Maret 2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Aprilia Herlin  
N P M : 1403090013  
Program Studi : FISIP  
Alamat rumah : Jalan Araw. no. 26 RT. 05 RW. 02 kel. Sumur Meleleh  
Kec. Teluk Segara Telp : 0822 3679 9963

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap ;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap 2;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap 2; dan Melampirkan yang Asli nya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompri, rangkap 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
11. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap 2;
12. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
13. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 5 eksemplar dan dijilid.

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, Wassalam.

Pemohon,

(Aprilia Herlin)

Disetujui oleh ;

Medan, 21 Maret 2018

Medan, 21 Maret 2018

Plt.Dekan,

a.n.Rektor,  
Wakil Rektor - I



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 1 Medan 20221 Telp. (061) 66224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: www.umuh.ac.id E-mail: yaktorg@umuh.ac.id  
 Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas & Terpercaya  
 Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

SK-7

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap : Aprilia Herlin  
 NPM : 103090013  
 Tempat / Tgl. Lahir : Bengkulu / 16 April 1995  
 Agama : Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha\*  
 Status Perkawinan : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/Janda\*  
 Alamat Rumah : Jalan Araw no. 26 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Sumur meleh  
 kec. Telok Sejara Telp. 0822 7699 9763  
 Pekerjaan/Instansi : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 Telp. ....

melalui surat permohonan tertanggal ..... telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Ujian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah Swt, meridhoi saya. Amien.

Saya yang menyatakan



Aprilia Herlin



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Bakri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6624567-4001-40450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 E-mail: [info@umsu.ac.id](mailto:info@umsu.ac.id) <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

SK-8

**BORANG DATA ALUMNI**



I. DATA PRIBADI	
NAMA LENGKAP	APRILIA HERLIN
TEMPAT DAN TGL. LAHIR	BENGKULU / 16 APRIL 1995
AGAMA	ISLAM
SUKU / BANGSA	INDONESIA
NO. TELEPON	0822 7679 9953
E.MAIL	APRILIAHERLINS00@gmail.com
ALAMAT RUMAH & KODE POS	Jalan Arrow No. 26 Rt. 5 Pw. 2 Ed. Sm. Meleleh Kec. Teluk Segara 3813
II. KEMAHASISWAAN	
TAHUN MASUK UMSU	2014
N.P.M	1403090013
PROGRAM STUDI	FISIP / ILMU KESEKUTERAHAN SOSIAL
PINDAHAN/ASAL SEKOLAH	SMA NEGERI 6 KOTA BENGKULU
ALAMAT SEKOLAH	Jln. Adit No. 23, Balak Kec. Teluk Segara
MENDAPAT BEASISWA	BEASISWA
(Selama di UMSU)	TA. 2015
	BEASISWA
	TA.
III. KETERANGAN PENYELESAIAN STUDI	
JADWAL UJIAN SKRIPSI	HARI : TANGGAL :
NILAI/IPK/PREDIKAT	NILAI : IPK : PREDIKAT :
JUDUL SKRIPSI	IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI <del>BERDASAR</del> KOMISI E DPRD SUMUT. TERHADAP PEMBANGUNAN KESEKUTERAHAN SOSIAL DI SUMATERA UTARA
IV. KETERANGAN KELUARGA	
STATUS SIPIL	KAWIN/BELUM KAWIN/JANDA/DUDA*
NAMA SUAMI/ISTRI*	
JUMLAH ANAK KANDUNG	PRIA ... ORANG, WANITA ... ORANG, JILIR ... ORANG
NAMA AYAH	HERMAN WAFAT TAHUN .....
NAMA IBU	MARLINA WAFAT TAHUN .....
PEKERJAAN ORANG TUA	WIRASWASTA
NO. TELEPON	0052 7357 5369
ALAMAT RUMAH & KODE POS	Jln. Arrow No. 26 Rt. 5 Pw. 2 Ed. Sm. Meleleh Kec. Teluk Segara 3813
V. KETERANGAN PEKERJAAN	
PEKERJAAN	-
NAMA INSTANSI	-
ALAMAT INSTANSI	-
NO. TELEPON/FAX	-



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 209 / KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018

Lampiran : -,-

Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 22 RabiulAkhir 1439 H

10 Januari 2018 M

Kepada : Yth, Ketua DPRD  
Provinsi Sumatera Utara  
di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu ( S1 ), kami mohon kiranya Bapak / Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : APRILIA HERLIN  
N P M : 1403090013  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2017 / 2018  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI E DPRD SUMUT TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DI SUMATERA UTARA.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

**Dis. TASRIE SYAM., M.Si**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270  
MEDAN

Email : Humas.dprdsulut@gmail.com

Kode Pos 20112

Medan, 19 Januari 2018

Nomor : 155 /18/Sekr  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara

di-

Medan

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 209/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2017 tanggal 10 Januari 2017 Perihal Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa dengan ini memberikan Izin Kepada:

Nama : Aprilia Herlin  
N P M : 1403090013  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2017/2018  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD Prov. Sumut Terhadap Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara

Untuk Melaksanakan Izin Penelitian di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

a.n Sekretaris DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABUPATEN SUMUM  
SEKRETARAT  
AHMAD EFFENDI, S.Sos.MSP  
PENYUSUN  
No. 19620606 198503 1 011